

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA AJAOBAKI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Akhmad Syafruddin

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Corespondensi author email: akhmad.syafruddin@staf.undana.ac.id

Junus Ekha Nahas Chornelis Nahas

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: junusnahas13@gmail.com

Abstract

Based on the suboptimal role of community empowerment institutions in supporting development in Ajaobaki Village, Mollo Utara Subdistrict, South Central Timor Regency, and the resulting impact on suboptimal development, this study uses a domestic regulation number 5 of 2007 on guidelines for organizing community institutions and the behavioralism approach, as well as Robert Chambers' theory of empowerment to analyze the role of community empowerment institutions in the economic empowerment of Ajaobaki Village. This study adopts a qualitative method and focuses on four main indicators of the role of community empowerment institutions in Ajaobaki Village. The research findings indicate that the Ajaobaki Village Empowerment Institution (LPM) as a facilitator has been optimal, as evidenced by the implementation of several community empowerment programs. However, as a mediator, the LPM's role is considered suboptimal due to traditional and ineffective processes of development information socialization. Additionally, the role of a mediator is not fully realized. The LPM's role as a motivator is also deemed suboptimal, as no active programs are in place. As a dynamic, the LPM's role is not optimal, with the explanation that the Ajaobaki Village LPM lacks performance in energizing empowerment programs. The inhibiting factors identified are institutional factors, namely the LPM itself, due to the inactivity of its members and the lack of specific work programs.

Keywords: Community Empowerment Institutions, Community Empowerment

Abstrak

Berangkat dari tidak optimalnya peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan yang ada didesa desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan serta dampak pada pembangunan tidak berjalan secara maksimal. Kajian ini menggunakan peraturan dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan dan pendekatan behavioralism serta Teori pemberdayaan (empowerment) dari Robert Chambers dalam menganalisis peran dari Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi desa Ajaobaki. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada 4 (empat) indikator utama peran dari Lembaga pemberdayaan masyarakat di desa Ajaobaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lpm desa Ajaobaki sebagai fasilitator sudah optimal dilihat melalui terimplementasinya beberapa program pemberdayaan masyarakat. Lpm desa Ajaobaki sebagai mediator, dinilai belum optimal dikarenakan proses sosialisasi informasi pembagunan masih tradisional dan tidak efektif. Selain itu juga, peran sebagai mediasi tidak terlaksana. Lpm desa Ajaobaki sebagai motivator dinilai tidak optimal,

dilihat dari tidak ada program yang bejalan. Lpm sebagai dinamisator tidak optimal, dengan penjelasan bahwa lpm desa Ajaobaki tidak memiliki kinerja dalam mendinamiskan program pemberdayaan. Faktor yang dilihat sebagai penghambat adalah faktor kelembagaan yakni lpm itu sendiri, dikarenakan tidak aktifnya anggota dan program kerja yang tidak spesifik..

Kata Kunci : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji Optimalisasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Ajaobaki Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemberdayaan masyarakat sejatinya merupakan kegiatan yang mampu untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dalam bidang yang dinilai tertinggal.

Beberapa penelitian terkait yang telah dilaksanakan memfokuskan peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bunga Delva Putri 2021 meneliti tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian menunjukkan bahwa lpm sebagai fasilitator keterlibatan lpm lebih mengarah pada keikutsertaan dalam setiap pertemuan untuk membahas perencanaan pembangunan. Sebagai motivator lpm belum mampu mempengaruhi dan meningkatkan semangat gotong royong masyarakat secara persuasif. Jupriadi 2021 yang meneliti peran lembaga pemberdayaan masyarakat keluarahan dalam perencanaan pembangunan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat keluarahan telah berperan dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan pangkalan lesung. Indikator perangkat hak-hak dan kewajiban ini telah dilaksanakan oleh lpm keluarahan dalam memerankan fungsinya sebagai lembaga mitra dilaksanakan oleh lpm keluarahan dalam memerankan fungsinya sebagai lembaga mitra dari lurah. Lembaga pemberdayaan masyarakat keluarahan Pangkalan Lesung telah berperan dalam menyusun rencana pembangunan, telah menggali aspirasi dari masyarakat, mencermati pembangunan paling dibutuhkan masyarakat, memahami kebutuhan paling mendasar yang dipenuhi. Abubakar Zubedi meneliti tentang Efektivitas Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif di Kelurahan Limba U1 dinilai belum optimal: Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan. masih rendahnya pengawasan secara berkelanjutan terhadap kegiatan yang berjalan.

Penelitian ini merupakan suatu pembaharuan dan merupakan pembeda dalam penelitian mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di desa. Fokus penelitian ini melihat pada peran dari lembaga pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Ajaobaki. Berdasarkan hasil observasi penulis, dilihat beberapa fenomena yang memperlihatkan belum optimalnya peran lpm dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari lpm belum maksimal dalam

mengendalikan pembangunan di desa baik itu dari tahap perencanaan hingga pengawasan keberlanjutan program dan kegiatan.

Dalam skala nasional desa dipandang sebagai dasar dari pembangunan (grass root). Ini berarti bahwa desa memiliki peran yang besar dalam pembangunan negara. Desa memiliki banyak potensi dalam berbagai bidang namun belum ada penanganan lebih lanjut terutama pada bidang pemberdayaan yang berkelanjutan. Hal ini berakibat pada tidak berkembangnya masyarakat secara optimal ke arah yang lebih baik. Menurut Fratama 2021, walaupun lpm sudah ada ditengah-tengah masyarakat desa, tetapi masih terdapat pembangunan-pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa terkadang tidak sesuai dengan yang diperlukan masyarakat. Keadaan ini dapat dilihat lewat banyaknya program serta kegiatan di berbagai bidang yang masuk ke desa dan telah ditopang oleh pendanaan cukup besar, namun pada kondisi di lapangan hanya menjadikan masyarakat desa sebagai penerima pasif tanpa ada partisipasi aktif atau lebih dikenal dengan pembangunan yang bersifat dari atas ke bawah. Suryono, 2022 juga menjelaskan bahwa masih lemahnya fungsi dan tugas lpm sebagai representasi masyarakat dalam memfasilitasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat. Peran lpm yang masih lemah dan belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada kajian-kajian sebelumnya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang dimaksud yakni pada desa ajaobaki Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemberdayaan ekonomi yang sedang berjalan di desa selama beberapa tahun terakhir adalah pada bidang usaha kecil menengah dengan total jenis usaha yang cukup banyak. Jenis usaha yang ada pada kelompok ini sekarang terdiri dari 33 jenis produk yaitu: stik ubi jalar ungu, stik ubi jalar kuning, stik kentang, stik labu kuning, stik wortel, stik kacang hijau, stik jagung, keripik pisang, keripik singkong, keripik kentang, keripik ubi jalar kuning, keripik ubi jalar ungu, keripik talas, rambutan ubi jalar, jagung goreng, jagung bunga, kacang goreng, kacang telur, brownies singkong, brownies wortel, luat, kopi jahe, madu, instan kunyit, instan jahe, instan temu lawak putih, instan temu lawak kuning, anggur pisang, anggur jahe, kain tenun motif daerah, souvenir, jasuku. Selama beberapa tahun terakhir upaya pemberdayaan yang dapat dilihat hanya pada bidang kelompok Wanita tani desa Ajaobaki yang berjumlah 15 orang. Pada tahun 2015 UP2K Wanita Tani Suka Maju mendapatkan perhatian dari pemerintah desa yaitu berupa dana pemberdayaan sebesar Rp.25.000.000,00 untuk keperluan peralatan dapur dan bangunan tempat usaha.

Dalam melihat desa sebagai akar dari pembangunan negara, desa memiliki nilai yang khas yakni keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Desa Ajaobaki dengan keadaan geografis yang menguntungkan dan potensi alam yakni diantara bukit-bukit dan pengunungan seperti bukit tomeas, fatunausus, namun belum ada pemberdayaan yang optimal. Keindahan alam menarik orang untuk berkunjung, seharusnya menjadi salah satu bidang untuk diberdayakan secara ekonomi bagi masyarakat desa. Pengembangan daerah menjadi tempat wisata (ecowisata) dapat menjadi salah satu kekuatan dalam membangun ekonomi masyarakat desa. Dikarenakan belum ada pemberdayaan dan pengelolaan yang baik dalam bidang parawisata ini maka, pengunjung yang datang menyebabkan sampah berserakan karena belum ada titik kumpul sampah yang jelas, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Pengelolaan yang minim menyebabkan jumlah kunjungan yang belum sesuai harapan, serta tidak stabil.

Dari berbagai potensi yang ada di desa dan beriringan dengan potensi sumber daya manusia, dapat dilihat bahwa secara mandiri masyarakat belum mampu untuk memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Kualitas sumber daya manusia di desa belum dapat menjadi pendorong untuk masyarakat mandiri dan berdaya dalam bidang ekonomi. Hal ini berakibat pada pembangunan yang tidak optimal.

Pemberdayaan secara tidak langsung merupakan bentuk urusan desentralisasi politik (devolusi). Otonomi desa merupakan otonomi yang bersifat asli, utuh, dan bulat serta otonomi desa merupakan suatu pemberian pemerintah dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati segala sesuatu yang terdapat dalam otonomi desa tersebut. Sebagai masyarakat yang memiliki tatanan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam bertindak hukum. Desa memiliki kewenangan dalam bertindak membentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan teritorial dan kondisi masyarakatnya sebagai jembatan dalam membantu fungsi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pemerintah desa dengan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan suatu desa.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan, desa membentuk Lembaga kemasyarakatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan masyarakat desa. Sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga pemberdayaan masyarakat yang kemudian disebut dengan lpm adalah lembaga yang bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan pemberdayaan di desa. Secara yuridis peran lpm diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007. Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 pasal 8 yang mengatur tentang lembaga pemberdayaan masyarakat desa: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (lpm/lpmk) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam perincian perannya, lpm difokuskan sebagai fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator pada pemberdayaan di desa. Oleh karena itu, peran lpm sangat besar dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan strategi studi kasus yang merupakan penelitian yang berpangkal dari pola fikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Pengamatan tersebut diarahkan pada individu atau kelompok sosial tertentu dengan berpedoman pada tujuan tertentu atau fokus permasalahan tertentu. (Nursapiyah, 2020). Penelitian kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat menginterpretasikan fenomena-fenomena dari individu dan kelompok sebagai subjek dari penelitian dalam bentuk analitis deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemilihan tempat penelitian didasari oleh hasil observasi yang dilakukan bahwa desa Ajaobaki merupakan desa dengan angka kemiskinan ekstrim.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang ditemukan digunakan teknik analisis

model interaktif dengan langkah-langkah, pertama melakukan reduksi data, melakukan penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

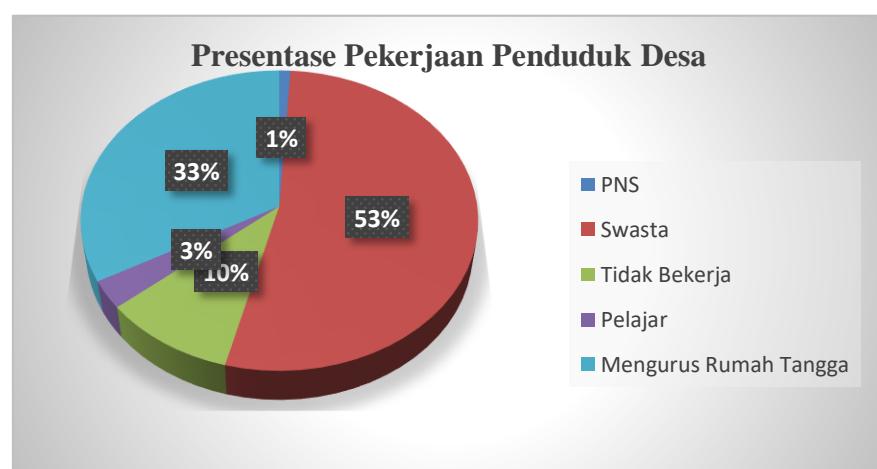
Kondisi Geografis Desa Ajaobaki

Desa Ajaobaki merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Mollo Utara, kabupaten Timor Tengah sekitan dengan luas wilayah 15 Km2, dengan batas – batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tunua, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa O’besi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebot, Sebelah utara berbatasan dengan Desa Fatukoto. Secara umum, topografi desa Ajaobaki berbukit dengan sedikit hamparan dan masyarakat menjadikan daerah perbukitan maupun hamparan yang ada sebagai komoditi baik tanaman umur panjang, palawija, pangan dan hortikultura. Keadaan iklim di Desa Ajaobaki pada umumnya sama dengan iklim yang ada di seluruh wilayah Provinsi Nusa tengara Timur yang di kenal dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat desa Ajaobaki mayoritas tamat SD/Sederajat, berikut tingkat pendidikan masyarakat desa Ajaobaki:

Tabel 4.3 Status Pendidikan Masyarakat Desa

No.	Status Pendidikan	L	P	Total	%
1	Tidak / belum sekolah	89	85	174	10,8
2	Belum tamat SD / Sederajat	152	127	279	17,4
3	Tamat SD / sederajat	232	160	392	24,5
4	Tamat SLTP / Sederajat	118	132	250	15,6
5	Tamat SLTA / sederajat	208	192	400	25
6	Diploma	5	10	25	1,5
7	Strata I	21	15	36	2,2
8	Strata II dan Strata III	23	30	53	3
JUMLAH		848	751	1.599	100%



Grafik 1. Pekerjaan Penduduk Desa Ajaobaki

Analisis/Diskusi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ajaobaki

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa Ajaobaki dibentuk pada masa kepemimpinan kepala desa Ajaobaki Arnoldus Nitbani yakni pada tahun 2008. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa Ajaobaki bertugas dan bertanggung jawab bersama lembaga kemasyarakatan yang lain dalam upaya membantu pemerintah desa dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan di desa Ajaobaki. Dibentuknya lpm di desa Ajaobaki menciptakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih dalam dari sebelumnya pada pembangunan desa. Pembangunan yang partisipatif menjadi salah satu tujuan utama dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan terutama lpm dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kehadiran lpm dalam mendongrak pembangunan yang partisipatif menjadi wadah yang tepat bagi seluruh unsur dan golongan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Upaya memberdayakan desa baik itu pemerintahannya dan lembaga kemasyarakatan merupakan langkah strategis mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Lpm sebagai bagian dari struktur organisasi dalam desa, berarti bahwa secara normatif lpm menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan di desa. Kehadiran lpm pun dalam hal ini menjadi wakil rakyat terutama dalam bidang pemberdayaan di desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa Ajaobaki dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah sejak dulu selalu dikenal oleh masyarakat dengan kegiatan yakni menggerakan gotong – royong pada bulan bakti masyarakat.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Ajaobaki

LPM sebagai fasilitator berperan dalam musrembang desa. Musrembang dilihat sebagai instrument utama dalam partisipasi masyarakat yang menghasilkan rencana kerja pemerintah desa dalam penggunaan APBDes yang optimal. Sehingga penggunaan sumber daya dalam hal ini APBDes secara tidak langsung mewakili aspirasi dari masyarakat dan kebutuhan masyarakat desa. Perumusan pembangunan yang dimaksud adalah bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai fasilitator lpm desa Ajaobaki berpartisipasi dalam menyusun rencana pembangunan ditingkat desa dan turut dalam penentuan prioritas pembangunan di desa. Dilihat melalui keterlibatan lpm dalam memfasilitasi kegiatan musrembang dan ikut serta mengambil bagian serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai mitra kerja desa Ajaobaki.

Peran lpm desa Ajaobaki dalam perumusan rencana pembangunan dan penetapan prioritas kebutuhan masyarakat dapat dilihat dengan implementasi pemberdayaan kelompok ternak pada bulan november tahun 2020 kepada masyarakat desa sebanyak 20 orang. Implementasi pemberdayaan kelompok ternak merupakan aspirasi masyarakat sebagai salah satu potensi pemberdayaan dengan pertimbangan oleh lembaga kemasyarakatan di desa yakni lpm dan bpd dalam kemitraan dengan pemerintah desa.

Keterlibatan lpm desa Ajaobaki dalam turut menentukan prioritas pembangunan di desa merupakan sasaran dalam pembangunan baik jangka menengah dan jangka panjang bagi masyarakat desa. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti kepada beberapa narasumber bahwa penentuan prioritas kebutuhan pembangunan ditingkat desa tidak diputuskan hanya berdasarkan dengan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat memang merupakan salah satu indikator yang penting tetapi penentuan prioritas pembangunan di desa juga memerhatikan

urgensi pembangunan baik ditingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Peran lpm desa Ajaobaki dalam penentuan prioritas pembangunan di desa dilihat dari terimplementasinya kelompok ikan sebagai upaya pemenuhan gizi bagi keluarga dalam penanganan stunting dimulai dari desa. Selain itu juga dengan dibentuknya kelompok ternak sebagai salah satu pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu sehingga dapat menjadikan itu sebagai salah satu penghasilan jangka panjang.

Peran yang aktif dari lpm desa Ajaobaki juga terlihat dengan diimplementasikannya beberapa kegiatan pemberdayaan yang telah disetujui pada saat proses perencanaan. Hal ini dilihat dari pemberdayaan perempuan dalam kelompok umkm yang dibentuk bersama oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa pada tahun 2012. Kelompok umkm hingga sekarang berkembang dengan sangat baik dan memberdayakan masyarakat desa berupa ibu – ibu yang tidak bekerja. Selain itu, pembentukan kelompok ikan pada bulan oktober tahun 2022 dengan 5 kelompok awal sebagai kelompok pertama dan akan berkembang kedepan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 25 orang dan 25 kolam budidaya.

Selain menjadi media dalam penyampaian informasi pembangunan di desa, lpm sebagai mediator juga sebagai wadah penghubung dan penengah antara aktor – aktor pembangunan di desa baik itu pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Namun hal ini belum terlihat terlaksana pada lembaga pemberdayaan masyarakat desa Ajaobaki.

Dari sisi normatif, pelaksanaan peran mediator tidak terlaksana secara optimal. Upaya sebagai mediator dilihat tidak efektif, dalam hal ini kelembagaan menjadi kelemahan dalam upaya menciptakan pembangunan yang kuat dan berkelanjutan dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat akan sulit dicapai. Kepengurusan yang tidak aktif dan kekurangpahaman akan tupoksi yang spesifik menjadi hambatan lpm bekerja secara optimal, terutama dalam menjalankan perannya sebagai mediator didesa. Peran sebagai mediator dinilai tidak optimal dan diperlukan penguatan kelembagaan kepada lpm desa Ajaobaki.

Peran sebagai motivator akan menunjang antusias masyarakat dan sehingga masyarakat terus aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang berlangsung sehingga dapat dihindari sikap apatisme atau tidak ingin terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini juga menjadi faktor pendukung agar pemberdayaan berjalan secara berkelanjutan (sustainable) hingga mencapai tujuan yakni masyarakat desa yang mandiri dan lebih sejahtera.

Peran lpm desa Ajaobaki dalam pemberdayaan di desa tidak terlihat melakukan kegiatan – kegiatan yang memotivasi masyarakat. Peran sebagai motivator pernah berjalan yakni pada bulan bakti dan gotong royong masyarakat desa. Namun, hal ini sudah berhenti sejak pandemi covid-19 pada 2019 hingga sekarang. Peran dari lpm desa Ajaobaki masih sangat pasif dan belum optimal. Diperlukan peningkatan baik visi dan misi dari lpm desa Ajaobaki dan juga peningkatan dari sisi kelembagaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, peran sebagai dinamisator sama sekali tidak berjalan dikarenakan lpm desa Ajaobaki tidak memiliki rencana kerja yang jelas dan juga kurang spesifik serta dari sisi kepengurusan kurang aktif. Peran lpm desa Ajaobaki sebagai dinamisator dapat disimpulkan masih belum optimal dalam menunjang pemberdayaan ekonomi yang ada didesa.

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi dalam bidang pertanian kelompok tani selalu terlibat dalam diskusi dan musyawarah pembangunan desa melalui koordinasi lembaga kemasyarakatan desa baik itu lembaga pemberdayaan masyarakat dan badan permusyawaratan desa. Aspirasi – aspirasi tersebut diimplementasikan berupa bantuan yang diberikan seperti pemberian pupuk, pembagian bibit, serta sosialisasi peningkatan kapasitas bagi masyarakat kelompok tani. Dengan harapan agar terjadi pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan dari wawancara dan observasi dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi di desa Ajaobaki sudah sangat baik dan bertumbuh secara berkala dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa. Upaya peningkatan kapasitas kelompok tani dan penyediaan teknologi tepat guna akan sangat membantu masyarakat yang tergabung pada kelompok tani dalam upaya menjadi mandiri serta pemberdayaan yang ada terus berkelanjutan (sustainable). Dalam sudut pandang kelembagaan peran dari Lembaga pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan agar berpartisipasi sesuai dengan landasan teoretisnya.

KESIMPULAN

Peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa Ajaobaki dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada bidang pemberdayaan ekonomi berdasarkan indikator 4 (empat) indikator utama yakni lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator.

1. Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator, Sebagai fasilitator lpm desa Ajaobaki turut berpartisipasi dalam menyusun rencana pembangunan ditingkat desa dan turut dalam penentuan prioritas pembangunan di desa.
2. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa Ajaobaki sebagai mediator lpm turut mensosialisasikan rencana prioritas pembangunan kepada masyarakat melalui cara yang masih terbilang tradisional yakni dari mulut ke mulut. Sehingga ini menjadi salah satu pengambat lpm desa Ajaobaki dalam menjalankan tugas sebagai mediator. Lpm sebagai mediator juga sebagai wadah penghubung dan penengah antara aktor – aktor pembangunan di desa baik itu pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Namun hal ini belum terlihat terlaksana pada lembaga pemberdayaan masyarakat desa Ajaobaki.
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai motivator, lpm desa Ajaobaki dalam menjalankan tugasnya sebagai motivator terlihat tidak maksimal karena peran sebagai motivator hanya terlaksana dalam menggerakkan gotong royong dimasyarakat. Namun, kegiatan gotong – royong pun sudah tidak berjalan sejak pandemi covid – 19. Oleh karena itu, fungsi sebagai motivator tidak berjalan. Peran lpm desa Ajaobaki dalam pemberdayaan di desa tidak terlihat melakukan kegiatan – kegiatan yang memotivasi masyarakat. Peran sebagai motivator pernah berjalan yakni pada bulan bakti dan gotong royong masyarakat desa. Namun, hal ini sudah berhenti sejak pandemi covid-19 pada 2019 hingga sekarang.
4. Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai dinamisator, lpm desa Ajaobaki terlihat sama sekali tidak menjalankan perannya sebagai dinamisator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. lpm tidak terlibat dan mengambil bagian dalam memantau keberlanjutan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang ada serta turut mensinergikan berbagai pihak yang terlibat. Dalam proses evaluasi program pun lpm desa Ajaobaki tidak berpartisipasi.

Dalam melihat peran yang belum optimal dari Lembaga pemberdayaan masyarakat desa Ajaobaki terdapat beberapa faktor yang memengaruhi. Faktor pendukung yakni, pemerintah desa cukup aktif dan memiliki visi yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat di desa. Selain itu, masyarakat cukup aktif untuk terlibat dalam kegiatan – kegiatan pemberdayaan yang ada. Faktor yang menjadi penghambat dalam peran lembaga pemberdayaan masyarakat adalah lembaga itu sendiri. Ketidakaktifan kepengurusan berdampak pada koordinasi dan komunikasi yang putus dalam menjalankan peran dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya masih terdapat badan pengurus lpm yang memiliki pekerjaan lain. Hal ini menyebabkan tugas dan fungsi lpm terabaikan secara kerja nyata. Fungsi yang dipenuhi hanya secara formalitas. Faktor – faktor yang ada berdampak pada pembangunan yang tidak maksimal. Sehingga dalam jangka yang panjang desa stagnan pada titik tertentu dan tidak dapat berkembang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Safyuddin, yunus, suadi, & fadli. (2017). Model pemberdayaan : (vol. 31, issue 2).
- Firtiana, N. (2020). revitalisasi dan pengelolaan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Ir. Hendrawati Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In De La Macca (Vol. 01, Issue 1).
- (Novitasari, Indah, 2021) Novitasari, Indah, M. S. (Han). (2021). Perbandingan Politikk.
- Nursapiyah. (2020). Penelitian kualitatif.
- Prof. Dr. A. Muri yusuf, m. P. (2007). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan gabungan.
- Rahmadi , s.ag., m. P. I. (2011). Pengantar metodologi penelitian. In suparyanto dan rosad (2015 (vol. 5, issue 3).
- Sugiono, p. D. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r & D.
- Abubakar zubedi. (2022). Efektivitas fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan limba u1 kecamatan kota selatan kota gorontalo.
- Fratama, a. (2021). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) dalam pembangunan fisik di desa telaga kecamatan batu ampar kabupaten kutai timur. 2021(1), 61–74.
- Maiti, & bidinger. (2015). Metode pemberdayaan masyarakat. Journal of chemical information and modeling, 53(9), 1689–1699.
- Muhtarom abid. (2016). Peran lpm di desa lamongan. 1(1), 181–204.
- Yayang septian sari. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata di desa pulau pahawang kecamatan marga punduh kabupaten pesawaran. In suparyanto dan rosad (2015 (vol. 5, issue 3).
- Bil, d., pemberdayaan, h. A. L., & desa, e. (2023). Pengolahan kopi (perspektif chambers). 6(1), 213–221.
- Suharto, edi; ph, d. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat. Refika aditama, 57.
- Suryono, K. E. (2022). MENGERAKKAN MASYARAKAT BERBASIS WILAYAH (DPD LPM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Undang- penguatan individu anggota masyarakat keistimewaan.

- Abubakar Zubedi. (2022). EFEKTIVITAS FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LIMBA U1 KECAMATAN KOTA SELATAN KOTA GORONTALO.
- Bil, D., Pemberdayaan, H. A. L., & Desa, E. (2023). PENGOLAHAN KOPI (PERSPEKTIF CHAMBERS). 6(1), 213–221.
- Eko, A., Arfianto, W., Riyadh, A., & Balahmar, U. (2014). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA.
- Firana. (2014). PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DI KELURAHAN KARAS KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2011.
- Firtiana, N. (2020). revitalisasi dan pengelolaan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Fratama, A. (2021). PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA TELAGA KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUTAI TIMUR. 2021(1), 61–74.
- I, J. u p r i a d. (2021). PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN.
- Ir. Hendrawati Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In De La Macca (Vol. 01, Issue 1).
- MASNONA. (2018). PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENDEKATAN KELOMPOK DI DUSUN DWIDARMA DESA NEGARA RATU KEC. NATAR KAB. LAMPUNG SELATAN.
- Mulia, D. (2022). Pembangunan Fisik Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras.
- Mulia, D., Pengembangan, J., Islam, M., Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2022). PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN SOREK SATU.
- Negeri, M. D. (2007). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2007.
- Novitasari, Indah, M. S. (Han). (2021). Perbandingan Politikk. <http://repository.uki.ac.id/5202/1/BAPPPerbandinganPolitik.pdf>
- Nursapiyah. (2020). Penelitian Kualitatif.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. P. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan.
- Putri, B. D. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. <http://repository.uin-suska.ac.id/41258/>
- Robiatul, A. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. Kodifikasi, 5(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v5i1.223>
- Rosni. (2021). PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

- MEDAN DENAI KOTA MEDAN SUMATERA UTARA (Vol. 26, Issue 2).
<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Sugiono, P. D. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D.
- Suharto, Edi; Ph, D. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Refika Aditama, 57.
- Suryono, K. E. (2022). MENGERAKKAN MASYARAKAT BERBASIS WILAYAH (DPD LPM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Undang- penguatan individu anggota masyarakat keistimewaan.
- YAYANG SEPTIAN SARI. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PARIWISATA DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN. In Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3).